

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan semangat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini secara ideal tidak hanya dimaksudkan sebagai sistem politik prosedural, melainkan sebagai tatanan kehidupan bersama yang menekankan nilai kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, serta partisipasi aktif seluruh warga negara, termasuk rakyat kecil sebagai mayoritas sosial bangsa.¹ Dalam kerangka tersebut, demokrasi seharusnya menjadi ruang pembebasan dan pemberdayaan rakyat untuk menentukan arah kehidupan politik, ekonomi, dan sosial secara bermartabat.

Namun, jejak historis demokrasi Indonesia juga menyimpan pengalaman traumatik yang tidak dapat diabaikan, khususnya ketika negara berada di bawah kekuasaan rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dekade. Pada periode ini, prinsip-prinsip fundamental demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan kontrol terhadap kekuasaan, praktis ditiadakan. Rakyat kehilangan ruang dan hak untuk terlibat dalam proses politik, apalagi menyampaikan kritik terhadap penguasa. Konsolidasi kekuasaan yang represif tersebut berdampak luas, antara lain melalui maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, berlanjutan pelanggaran hak asasi manusia, serta pengekangan kebebasan sipil dan pers. Dalam konteks yang lebih luas, perjalanan demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era kontemporer menunjukkan dinamika yang problematis. Demokrasi kerap mengalami reduksi makna, bergeser dari cita-cita demokrasi yang substantif menuju praktik demokrasi

¹Yudi Latif, “Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila” dalam Yunus, Nur Rohim “Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Didaktika: Social Science Education Jurnal* 2:2 (Jakarta: November 2015), hlm. 161.

yang prosedural dan eliteis. Pada masa Orde Lama, kehidupan politik diwarnai oleh konflik ideologis serta dominasi kepentingan elite yang membatasi partisipasi rakyat. Pola ini kemudian mengeras pada masa Orde Baru melalui mekanisme kontrol politik yang ketat, sentralisasi kekuasaan, dan penyingkiran rakyat dari proses pengambilan keputusan publik. Reformasi 1998 yang diharapkan menjadi momentum pemulihan kedaulatan rakyat ternyata belum sepenuhnya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Demokrasi pascareformasi masih dibayangi oleh dominasi oligarki, praktik politik transaksional, lemahnya perlindungan terhadap rakyat kecil, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar.²

Kemunduran demokrasi di Indonesia tampak nyata melalui berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan yang secara terang-terangan mencederai nilai dan prinsip dasar demokrasi. Salah satu manifestasi paling mencolok terlihat dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024, yang sarat dengan intervensi kekuasaan secara berlebihan. Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya dikenal sebagai figur yang lahir dari semangat Reformasi, justru menunjukkan kecenderungan mempertahankan dan mewariskan kekuasaan melalui pembentukan dinasti politik. Hal ini tampak dalam pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, tokoh yang pada dua pemilihan presiden sebelumnya merupakan rival politiknya. Demi melancarkan langkah tersebut, berbagai instrumen kekuasaan negara digunakan secara problematis. Perubahan tafsir konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menimbulkan kontroversi serius dan dipandang sebagai bentuk pelemahan terhadap prinsip negara hukum. Selain itu, politisasi bantuan sosial serta mobilisasi aparaturnya dalam kontestasi elektoral semakin menegaskan adanya ketimpangan kompetisi politik. Tidak mengherankan jika Pemilu 2024 oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu pemilu dengan kualitas terburuk sepanjang era Reformasi.

Persoalan demokrasi Indonesia tidak berhenti pada proses elektoral semata. Hingga kini, negara masih bergulat dengan persoalan struktural seperti maraknya

²Elva Imeldatur Rohmah, "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia dari Demokrasi ke Oligarki," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16:1 (Sumatra Utara: Januari 2024), hlm. 4-9.

korupsi, lemahnya penegakan hukum, belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, serta semakin terbatasnya ruang partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Akumulasi masalah tersebut menjadi indikator serius memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Penurunan kualitas demokrasi ini juga tercermin dalam berbagai indeks demokrasi internasional. *Economist Intelligence Unit* (EIU), dalam laporan Indeks Demokrasi 2023, mencatat skor Indonesia sebesar 6,53, menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,71. Sejalan dengan itu, peringkat Indonesia juga merosot dari posisi ke-54 menjadi ke-56 dari 167 negara, dan tetap diklasifikasikan sebagai *flawed democracy* atau demokrasi cacat.³ Temuan serupa disampaikan oleh *Freedom House*, yang menunjukkan penurunan skor kebebasan dan demokrasi Indonesia dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023.⁴

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison menilai bahwa demokrasi Indonesia dewasa ini tidak hanya mengalami stagnasi, tetapi juga menunjukkan kecenderungan kemunduran yang serius. Kondisi tersebut terjadi karena demokrasi justru dikuasai dan dimanipulasi oleh kelompok elite itu sendiri, yang oleh keduanya disebut sebagai elite predator.⁵ Vedi Hadiz secara khusus menegaskan bahwa pembajakan terhadap demokrasi telah berlangsung sejak awal proses demokratisasi pasca-Orde Baru. Ketika rezim Soeharto runtuh, tidak muncul kekuatan progresif yang cukup solid untuk menggantikan struktur kekuasaan lama. Akibatnya, kelompok elite yang sebelumnya berkelindan dengan rezim Orde Baru hanya melakukan transformasi simbolik dengan

³Tri Subarkah, “Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat” dalam *Media Indonesia*, 16 Februari 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeksterus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>, diakses pada 20 Februari 2026.

⁴Willy Medi Christian Nababan, “Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam” dalam *Kompas*, 31 Januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasiturun-kebebasan-pers-turut-terancam>, diakses pada 20 Februari 2026.

⁵Wijayanto, “Oligarki, Ketimpangan Ekonomi, dan Imajinasi Politik Kita”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/06460031/oligarki-ketimpangan-ekonomi-danimajinasi-politik-kita>, diakses pada 20 Februari 2026.

mengadopsi bahasa dan mekanisme demokrasi, termasuk melalui pembentukan partai-partai politik yang secara tiba-tiba mengklaim diri sebagai pendukung demokrasi.⁶

Lebih lanjut, Hadiz dan Robison menjelaskan bahwa transisi dari rezim otoritarian menuju era Reformasi tidak berjalan secara linear dan radikal. Elite predatoris, yang terdiri atas politisi, birokrat, dan pengusaha, membentuk aliansi politik-bisnis (*politico-business alliances*) demi melanggengkan kepentingan personal maupun kelompok. Jaringan kekuasaan yang telah terinkubasi sejak masa Orde Baru tersebut tetap bertahan dan bahkan memperoleh posisi strategis dalam tatanan politik Reformasi dengan cara beradaptasi ke dalam sistem demokrasi, baik melalui partai politik, lembaga pemerintahan, maupun institusi legislatif. Dalam proses tersebut, institusi-institusi demokrasi secara perlahan dibajak dan difungsikan sebagai instrumen untuk mempertahankan dominasi elite. Dengan demikian, Reformasi pada hakikatnya menjadi arena reorganisasi kekuatan politik lama ke dalam format politik yang baru. Demokrasi yang berkembang pasca-Orde Baru tidak sepenuhnya memutus relasi kuasa masa lalu, melainkan mereproduksi pola-pola kekuasaan Orde Baru dalam wajah yang berbeda.⁷

Bertolak dari analisis tersebut, Hadiz berargumen bahwa apa yang kerap disebut sebagai “kemunduran demokrasi” pada masa pemerintahan Joko Widodo sejatinya merupakan konsekuensi logis dari perkembangan demokrasi Indonesia yang sejak awal bercorak illiberal. Demokrasi yang tumbuh setelah tumbanganya Soeharto tidak pernah benar-benar terbebas dari dominasi oligarki yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru. Hingga kini, oligarki masih memegang kendali signifikan atas sistem politik Indonesia dengan membangun koalisi bersama kekuasaan negara, yang pada gilirannya melemahkan kualitas demokrasi. Dampaknya, rakyat sebagai pemilik

⁶Insan Wawasan, hasil wawancara dengan Vedi R. Hadiz, “Vedi Hadiz: Kuasa Oligarki Dilanggengkan lewat Populisme Islam”, <https://www.balairungpress.com/2018/08/19211/>, diakses pada 20 Februari 2026.

⁷Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia; The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge, 2004), hlm. 187.

kedaulatan justru semakin tersisih dari proses perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, pembongkaran relasi problematik antara oligarki dan kekuasaan negara menjadi agenda mendesak guna memulihkan demokrasi dan mengembalikan kedaulatan politik ke tangan rakyat.

Dalam konteks inilah penting membaca ulang demokrasi Indonesia dari perspektif rakyat kecil menjadi sangat mendesak. Rakyat kecil bukan hanya objek kebijakan atau korban sejarah, melainkan subjek sosial yang menyimpan potensi besar dalam menjaga dan menguatkan demokrasi substantif. Salah satu medium refleksi kritis yang relevan untuk membaca realitas tersebut adalah karya sastra, khususnya novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer. Novel ini secara lugas merepresentasikan konflik sosial-politik yang terjadi di Indonesia pascakemerdekaan, terutama dalam konteks pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di wilayah Banten Selatan. Melalui narasi yang berakar pada pengalaman historis masyarakat petani, Pramoedya menghadirkan gambaran penderitaan rakyat kecil yang terhimpit di antara kekuasaan negara yang lemah dan kekerasan kelompok pemberontak. Dalam novel tersebut, rakyat kecil digambarkan sebagai kelompok yang paling terdampak oleh kekacauan politik dan ketidakadilan. Gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tidak hanya menantang negara, tetapi juga menjadikan masyarakat desa sebagai objek dominasi melalui pendekatan represif dan manipulatif.⁸ Di wilayah yang jauh dari jangkauan kontrol negara, pemberontakan tersebut menjelma menjadi bentuk penjajahan baru dalam tubuh bangsa sendiri. Rakyat kecil kehilangan rasa aman, hak hidup yang layak, serta ruang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dalam kondisi demikian, demokrasi kehilangan makna substansialnya dan berubah menjadi sekadar jargon normatif yang tidak menyentuh realitas hidup rakyat.

Tokoh Musa dalam novel tampil sebagai simbol kolaborasi kekuasaan lokal dan kepentingan ideologis yang menyimpang. Kolaborasi seorang lurah dengan

⁸Onghokham, *Rakyat dan Negara* (Penerbit Kompas, 2000), hlm. 55.

juragan Musa merepresentasikan realitas aparaturnya pemerintahan yang seharusnya melindungi rakyat, tetapi justru bekerja sama dengan kekuatan Darul Islam demi kepentingan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Kolaborasi ini menegaskan bagaimana demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat justru dimanipulasi oleh elite lokal dan kekuatan pemberontak yang menindas. Dalam konteks ini, negara tidak hadir sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai bagian dari struktur yang memungkinkan terjadinya penindasan dan terciptanya ketidakadilan. Meskipun demikian, Pramoedya tidak menarasikan rakyat kecil sebagai kelompok yang pasif dan tak berdaya. Sebaliknya, ia menampilkan persatuan rakyat kecil sebagai kekuatan sosial yang lahir dari pengalaman ketidakadilan bersama. Melalui solidaritas, kerja sama, dan kesadaran kolektif, rakyat kecil bangkit mempertahankan martabat dan ruang hidup mereka.⁹ Persatuan ini tidak selalu hadir dalam bentuk gerakan politik formal, tetapi tumbuh secara organik sebagai respons atas runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan dan kegagalan demokrasi prosedural. Dalam perspektif ini, persatuan rakyat kecil menjadi praktik nyata demokrasi substantif yang berakar pada partisipasi, keadilan, dan solidaritas sosial.

Sebagai karya yang lahir dari pengalaman langsung Pramoedya di tengah masyarakat petani Banten Selatan, novel ini memiliki kekuatan dokumenter yang kuat. Eka Kurniawan menegaskan bahwa *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* merupakan karya yang berakar pada observasi sosial yang nyata, sekaligus menandai fase penting dalam perkembangan estetika dan ideologi Pramoedya, terutama ketika ia mulai dekat dengan Lekra dan menjadikan sastra sebagai alat perjuangan sosial.¹⁰ Dalam kerangka ini, sastra tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi artistik, melainkan juga sebagai dokumen sosial yang merekam konflik, ideologi, dan kesadaran sejarah rakyat kecil.

⁹Putri Cahyani, "Nilai Perjuangan pada Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian Sosiologi Sastra", *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 2:1 (Jakarta: Januari 2024), hlm. 180–194.

¹⁰Eka Kurniawan, *Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis* (Yogyakarta: Insist Press, 2006), hlm. 137–138.

Pendekatan sosiologi sastra menjadi relevan untuk membaca novel ini karena memandang karya sastra sebagai cermin realitas sosial yang hidup dalam Masyarakat.¹¹ Sapardi menegaskan bahwa novel merupakan institusi sosial yang di dalamnya termuat nilai-nilai penting seperti moralitas, religiositas, dan keadilan.¹² Sementara itu, Teeuw menekankan bahwa pesan moral dalam karya sastra Pramoedya mendorong rakyat untuk meninggalkan sikap pasrah dan membangun persatuan sebagai jalan melawan penindasan dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, persatuan rakyat kecil tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perlawanan, tetapi juga sebagai fondasi moral bagi demokrasi yang bermartabat.¹³ Dengan demikian, *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* dapat dibaca sebagai kritik tajam Pramoedya terhadap praktik demokrasi yang telah menyimpang dari hakikatnya. Demokrasi yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi justru dikooptasi oleh kepentingan elite dan kekuasaan ideologis. Melalui narasi rakyat kecil yang bersatu mempertahankan martabat, Pramoedya hendak mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya dapat bertahan apabila berpijak pada persatuan dan kesadaran kolektif rakyat sebagai subjek utama sejarah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* dengan judul **“Persatuan Rakyat Kecil sebagai Basis Penguatan Demokrasi Substantif dalam Novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* Karya Pramoedya Ananta Toer.”** Kajian ini diarahkan untuk menelusuri secara kritis bagaimana persatuan rakyat kecil direpresentasikan dalam novel sebagai respons atas krisis demokrasi dan penyimpangan kekuasaan, sekaligus sebagai tawaran konseptual untuk kembali pada demokrasi yang sesungguhnya, yakni demokrasi yang berakar pada rakyat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian sastra Indonesia, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia dewasa

¹¹Maman Sikana, *Sosiologi Sastra: Suatu Pengantar Ringkas* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 107.

¹²Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989), hlm. 10.

¹³A. Teeuw, *Sastra dan Masyarakat: Suatu Pandangan Antropologis* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 209.

ini serta menegaskan kembali peran strategis rakyat kecil sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, skripsi ini mengkaji persatuan rakyat kecil sebagai basis penguatan demokrasi substantif dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-politik rakyat kecil direpresentasikan dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer dalam konteks demokrasi yang timpang dan tidak berpihak pada rakyat?
2. Bagaimana persatuan rakyat kecil dibangun dan dimaknai dalam novel tersebut sebagai kekuatan sosial kolektif dalam menghadapi ketidakadilan struktural?
3. Bagaimana makna persatuan rakyat kecil dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer dapat dipahami sebagai basis penguatan demokrasi substantif serta relevansinya dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini:

1. Untuk menganalisis bagaimana kondisi sosial-politik rakyat kecil direpresentasikan dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer dalam konteks demokrasi yang timpang dan tidak berpihak pada rakyat.
2. Untuk menjelaskan bagaimana persatuan rakyat kecil dibangun dan dimaknai dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer sebagai kekuatan sosial kolektif dalam menghadapi ketidakadilan struktural.

3. Untuk mengkaji makna persatuan rakyat kecil dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer sebagai basis penguatan demokrasi substantif serta relevansinya dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini.
4. Tulisan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metodologi Penulisan

Tulisan ini digarap dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam metode ini, penulis mencari, mendalami, dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku-buku teori sastra dan sosiologi sastra, jurnal ilmiah, artikel akademik dan populer, diktat kuliah, serta dokumentasi sejarah yang mendukung kajian. Setelah membaca dan mendalami berbagai literatur tersebut, penulis kemudian mengembangkan gagasan melalui penafsiran kritis terhadap novel. Analisis dilakukan dengan menyoroti tokoh, alur, latar, dan peristiwa yang mencerminkan perlawanan rakyat kecil, serta menempatkannya dalam konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi karya. Dengan demikian, metodologi ini menghasilkan narasi analitis yang sistematis, relevan, dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri atas lima bab utama, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas profil Pramoedya Ananta Toer dan latar historis yang memengaruhi karyanya dan mengulas isi novel secara umum dengan menyoroti unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang membentuk struktur naratif serta latar sosial yang tergambarkan dalam novel.

Bab III mengulas landasan teoretis tentang demokrasi dan hakikat kajian sosiologi sastra.

Bab IV merupakan bagian inti dari karya ilmiah ini, yang memuat analisis kritis mengenai persatuan rakyat kecil sebagaimana direpresentasikan dalam novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* karya Pramoedya Ananta Toer. Melalui pendekatan sosiologi sastra, bab ini menafsirkan makna sosial dan politik dari persatuan tersebut sebagai basis penguatan demokrasi substantif, serta mengaitkannya dengan realitas dan dinamika demokrasi Indonesia.

Bab V menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan beberapa saran yang relevan, baik bagi kajian akademik maupun praktik sosial-politik kontemporer.